



PENATAAN KAWASAN KUMUH TERSISA 114 HEKTARE Warga Bantaran Code Relahannya Dipangkas

JETIS (MERAPI) - Penataan kawasan kumuh di Kota Yogyakarta kembali dilanjutkan di bantaran Sungai Code pada tahun 2021. Kali ini menyasar permukiman bantaran Sungai Code di Kelurahan Gowongan, Terban dan Wirogunan.

"Penataan kawasan kumuh untuk mengembangkan kawasan yang sehat sehingga potensinya bisa dikembangkan," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi usai peletakan batu pertama penataan kawasan kumuh di Jogoyudan Kelurahan Gowongan, Kamis (1/4).

Penataan kawasan kumuh bantaran Sungai Code di tiga kelurahan itu mengacu konsep M3K yakni *mundur, munggah, madhep kali* atau mundur, naik dan menghadap ke sungai sebagai halaman rumah. Tapi pada penataan kawasan kumuh di Sungai Code di 3 wilayah itu hanya memundurkan dan menghadapkan rumah warga ke sungai.

Sejumlah rumah dan lahan warga dipangkas sehingga rumah mundur untuk pembangunan jalan lingkungan. Di Gowongan total ada 38 rumah yang dipangkas sebagian di tahun 2020 dan 27 rumah di antaranya pada tahun ini. Sedangkan di Terban ada 9 rumah dipangkas dan Wirogunan 2 rumah dipangkas tahun 2020.

"Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang mengikhlaskan sebagian lahan dan

rumah mundur dan digunakan untuk membuat akses jalan. Menjadi tanggung jawab Pemkot Yogyakarta untuk memperbaiki rumah maupun lahan warga yang sudah diikhlaskan jadi jalan," terangnya.

Pemkot Yogyakarta mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,1 miliar yang meliputi untuk penanganan rumah terdampak sekitar Rp 985 juta dan pembersihan penyiapan lahan sekitar Rp 200 juta. Penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code yang menggunakan dan APBN berupa penguatan talut sungai, pembangunan jalan lingkungan, pagar pembatasan, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal limbah rumah tangga, saluran drainase dan penerangan jalan.

"Penataan ini permukiman ini kami barengi dengan penataan sosialnya untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi keberadaan akses jalan sehingga produktivitas warga meningkat," papar Heroe.

Dia menyebut berdasarkan surat keputusan Walikota sebelumnya, sisa kawasan kumuh di Kota Yogyakarta seki-

tar 70 hektare. Namun diverifikasi kembali dengan SK Walikota Nomor 158 tahun 2021 masih tersisa sekitar 114 hektare kawasan kumuh di Kota Yogyakarta belum ditangani.

"Ini menjadi PR kami untuk menyelesaikan penataan kawasan kumuh di Kota Yogya. Harapan kami setiap tahun ada penataan. Mudah-mudahan dua sampai tiga tahun lagi bisa selesai," tambahnya.

Sementara itu Kepala Satuan Kerja Pelaksana Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY Arif Wahyu mengatakan, penataan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta adalah kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemkot Yogyakarta. Penataan itu bagian dari program Cipta Karya 100-0-100 yakni 100 persen sanitasi, 0 persen kumuh dan 100 persen air bersih. Pena-

taan kawasan kumuh di tepi Sungai Code di 3 kelurahan, menggunakan anggaran senilai Rp 13,9 miliar dengan waktu pengerjaan selama 270 hari.

"Untuk keberlanjutannya kami harap Pemkot Yogya melalui Dinas PUPKP agar aset yang kami laksanakan dijaga dan dirawat. Tidak hanya peran pemkot tapi juga masyarakat sekitar," papar Arif.

(Tri)-d



Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi meletakkan batu pertama menandai penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code.

MERAPI-TRI DARMIYATI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005